

**ANALISIS BELANJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2009 – 2011**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**ENGGA SYAFRISKA YULIA
NIM. 15310**

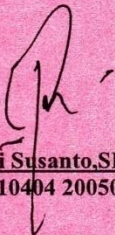
**JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS BELANJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2009-2011**

Nama : Engga Syafriska Yulia
NIM : 15310
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh
Koordinator Program Diploma III


Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP.19810404 200501 1 002

Padang, Januari 2013
Disetujui Oleh
Pembimbing


Erly Mulyani SE, M.si. Ak
NIP. 19781204 200801 2 011

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS BELANJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2009-2011**

Nama : Engga Syafriska Yulia
NIM : 15310
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.**

Padang, 28 Januari 2013

Tim Penguji,

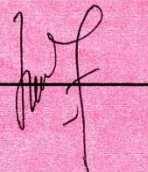
Ketua : Erly Mulyani, SE, M.Si. Ak



Anggota : Deviani, SE, M.Si, Ak



Anggota : Lili Anita, SE, M.Si,Ak



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENGGA SYAFRISKA YULIA
Thn. Masuk/NIM : 2009/15310
Tempat/Tgl. Lahir : Sumedang / 21 Juli 1991
Program Studi : DIII Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Gajah II Nomor 9
HP : 087792541921
Judul Tugas Akhir : **"ANALISIS BELANJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2009-2011"**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

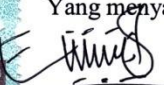
1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh Karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku



Padang, Januari 2013

Yang menyatakan,


Engga Syafrisk Yulia
NIM. 15310

ABSTRAK

Engga Syafriska Yulia 2009/15310: “Analisis Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2009-2011”

Pembimbing : Erly Mulyani, SE. MSi. AK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui belanja Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2011, penelitian ini dilakukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dan buku-buku serta peraturan yang mendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan dokumentasi.

Penggunaan data dalam menganalisis adalah anggaran belanja dan realisasi belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2011. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan rasio keuangan yang meliputi: pertama, analisis keserasian belanja yang terdiri dari analisis belanja operasi terhadap total belanja, analisis belanja modal terhadap total belanja, analisis belanja langsung dan tidak langsung. Kedua analisis efektifitas belanja. Ketiga analisis efisiensi belanja.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: a) menurut analisis keserasian belanja dihitung dari tahun 2009-2011, berdasarkan analisis belanja operasi terhadap total belanja, porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi di Sekretariat DPRD tinggi. Kemudian, analisis belanja modal terhadap total belanja, Dilihat dari persentase rasio ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan daerah pada proporsi belanja modal rendah. Selanjutnya, berdasarkan analisis belanja langsung dan tidak langsung, di Sekretariat DPRD belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung baik dilihat dari total belanjanya maupun persentasenya. b) menurut analisis efektifitas belanja Sekretariat DPRD dari tahun 2009-2011 cukup efektif. c) menurut analisis efisiensi belanja dari tahun 2009-2011 pada umumnya sudah efisien.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“ANALISIS BELANJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2009-2011”**. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih yang teristimewa penulis persembahkan buat Ibunda (Nurmainis) dan Ayahanda (Syafrial) Tercinta. adik adik tercinta (Ade Syafni Yulanda, Nursyaf Septian Yunaldo,) keponakan tersayang (Kevan, Kevin), spesial penulis ucapkan terimakasih untuk (Rahmat Hidayat S.P.d) serta seluruh keluarga yang telah mencukupi materi, mendukung dan mendoakan penulis demi menyelesaikan pendidikan Diploma III (DIII) ini, semoga Allah S.W.T membalas segalanya.

Seterusnya rasa terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada ibu Erly Mulyani, S.E, M.Si, Ak, selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu, pengarahan, perhatian, dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir.
2. Bapak Perengki Susanto, SE. M.Sc selaku Ketua Program Studi, dan Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu memberikan bimbingan akademik.

3. Bapak dan Ibu, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dalam penulisan karya ilmiah ini, serta kepada karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu di bidang administrasi.
4. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Universitas Negeri Padang dan Ruang Baca Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan perkuliahan dan karya ilmiah.
5. Kepala Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan pendidikan Diploma III (DIII) angkatan 2009.
7. Rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diberkati oleh Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari sistematika penulisan maupun dari pemilihan kata yang digunakan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian penulis yang lain di masa yang akan datang.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga tugas akhir ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca. Atas perhatian dari semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
LAMPIRA.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang...	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	8
I. Konsep Anggaran	8
II. Belanja Daerah	12
III. Analisis Belanja Daerah	19
1. Analisis keserasian Belanja.....	20
2. Analisis efektifitas Belanja.....	22
3. Analisis Rasio Efisiensi Belanja.....	23
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	24
A. Bentuk Penelitian	24
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
C. Rancangan Penelitian	25
D. Teknik Analisis.....	27

BAB IV PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	28
1. Struktur Organisasi	28
2. Data Kepegawaian.	29
3. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Bara.....	30
B. Pembahasan.....	32
1. Analisis Keserasian Belanja.....	32
a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja.....	32
b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja.....	34
c. Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja.....	36
2. Analisis Efektifitas Belanja.....	38
3. Analisis Efisiensi Belanja.....	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Total Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Dari Tahun 2009-2011.....	3
Tabel 2	Total Belanja Pegawai,Barang Dan Jasa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.....	4
Tabel 3	Data Pegawai Negeri Sipil Srekretariat DPRD Povinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2009 hingga 2011.....	30
Tabel 4	Realisasi Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2009-2011.....	33
Tabel 5	Realisasi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2009-2011.....	35
Tabel 6	Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2009-2011.....	37
Tabel 7	Rasio Efktifitas Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2011.....	38
Tabel 8	Rasio Efisiensi Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2009-2011.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi, pengelolaan anggaran belanja menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan di pemerintahan. Ketersediaan anggaran pemerintah yang sangat terbatas dan masih harus diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan, maka pengalokasian anggaran harus dilakukan secara berhati-hati dan bertanggung jawab agar anggaran yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara efisien dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan mekanisme pemerintahan di daerah, dimana otonomi benar-benar akan terlaksana dan menjadi kenyataan, sehingga diperlukan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Penyelenggaraan otonomi daerah ini didukung oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang kini direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan, yang kini direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004.

Dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih disbanding sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi

kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fisikal). Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menurut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut reformasi pembiayaan atau financing reform. (Mardiasmo, 2002:50)

Salah satu regulasi yang memuat reformasi pembiayaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Permendagri 13 Tahun 2006 yang kini telah direvisi dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa tujuan efektivitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelolanya, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, salah satu SKPD yang wajib menyiapkan kan laporan keuangan itu adalah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan laporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ” Laporan Realisasi Anggaran adalah menyajikan informasi tentang perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam tahun anggaran tertentu”. “melalui laporan realisasi anggaran, tampaklah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menbandingkan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu”. (Erlina, 2008:23)

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu SKPD pengguna anggaran yang memiliki peran sebagai entitas akuntansi. Organisasi sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat di bentuk berdasarkan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera barat adalah merupakan unsur staf dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD. Sebagai salah satu SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat diwajibkan setiap tahunnya menyusun Laporan Keuangan. salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran. namun, dalam Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD dari tahun 2009 sampai dengan 2011 terlihat belanja yang selalu meningkat tiap tahunnya.

Berikut ini akan disajikan mengenai jumlah belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2009 hingga 2011.

Tabel 1
Total Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Total Belanja Sekretariat DPRD
2009	48. 275. 203. 013
2010	54. 726. 655. 556
2011	67. 796. 227. 143

Sumber: Laporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan pada tabel 1, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selama periode 2009 hingga 2011 terjadi peningkatan jumlah belanja di Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Barat. Salah satu penyebab besarnya jumlah belanja setiap tahun adalah besarnya pengalokasian belanja untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Berikut akan disajikan jumlah belanja pegawai, belanja barang dan jasa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2009 hingga 2011:

Tabel 2
Total Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2011
(Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa
2009	17.332.863.238	30.231.983.400
2010	17.898.495.917	35.839.996.839
2011	20.295.492.678	40.399.549.760

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 2, memperlihatkan kecenderungan meningkat dari periode tahun 2009 hingga 2011 pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Hal ini menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tengah memiliki banyak kegiatan dari tahun ketahun dan adanya standar biaya yang selalu meningkat tiap tahunnya. Komponen belanja di Sekretariat DPRD terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin, dan belanja aset tetap lainnya, belanja tanah, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan. Menurut Halim dalam Rahmawati (2010) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Belanja daerah juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan dan pengendalian belanja sangat perlu dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran analisis terhadap belanja ini mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan kedepan (Mahmudi,2007:01). untuk menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah khususnya belanja, yaitu menggunakan analisis keserasian belanja, analisis efektifitas belanja, dan analisis efisiensi belanja.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul **”Analisis Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2011“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keserasian belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2011?
2. Bagaimana efektivitas belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2011?
3. Bagaimana rasio efisiensi belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2011?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengenai analisis belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana keserasian belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk mengetahui efektivitas belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, kemudian untuk mengetahui rasio efisiensi belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu:

1. Bagi penulis, untuk memperoleh tambahan ilmu sehingga penulis mendapatkan gambaran nyata dari teori yang didapatkan dibangku perkuliahan dibandingkan dengan kenyataan praktik yang ada.
2. Bagi instansi, dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengenai analisis komposisi anggaran belanja di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009-2011, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis keserasian belanja, terbagi dari analisis belanja operasi terhadap total belanja, dapat diambil kesimpulan: porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi di Sekretariat DPRD tinggi. Kemudian, analisis belanja modal terhadap total belanja, Dilihat dari persentase rasio ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan daerah pada proporsi belanja modal rendah. Selanjutnya, berdasarkan analisis belanja langsung dan tidak langsung, di Sekretariat DPRD belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung baik dilihat dari total belanjanya maupun persentasenya.
2. Berdasarkan rumusan masalah, menurut analisis rasio efektifitas belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat cukup efektif.
3. Berdasarkan rumusan masalah, menurut analisis rasio efisiensi belanja pada umumnya Sekretariat DPRD sudah efisien.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan mencoba memberikan saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap komposisi anggaran belanja di Sekretariat DPRD, yang mungkin digunakan sebagai dasar pertimbangan, yaitu:

1. Sebaiknya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera barat mengalokasikan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Sekretariat DPRD harus meningkatkan pengendalian dan perencanaan anggaran agar tercapai nya tujuan program kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*: Jakarta: Erlangga.

Nordiawan, Deddy. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, Deddy. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Prodi Diploma Akuntansi. 2011. *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Diploma Akuntansi*. Padang.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. 2009-2011. *Laporan Keuangan*.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*